

**PERAN NAHDHATUL ULAMA DALAM PEMBENTUKAN
IDEOLOGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD MAHMUDI
07370005

PEMBIMBING:

Dr. SUBAIDI., S.Ag., M.Si.

**SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Sejarah panjang Republik Indonesia diwarnai dengan pergulatan budaya, ideologi, hingga kepentingan paham dalam beragama. Dan, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang sangat vital dalam proses ini. Dalam sebuah transisi, termasuk kemerdekaan sebuah bangsa, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang merupakan bagian dari hegemoni kekuasaan dengan mengatasmakan perubahan dan peradaban selalu disertai dengan kepentingan. Setiap penyebaran nalar ideologis, pasti dipengaruhi unsur subjektivitas, yang hampir pasti memiliki nilai politis ataupun ekonomis, yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi NU tampaknya dapat mengesampingkan itu dengan prinsip untuk menegakkan semangat keindonesiaan tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks persiapan kemerdekaan, wacana mengenai dasar negara menjadi perdebatan yang sengit. Salah satunya mengenai dimasukkan atau tidaknya kata-kata syariat Islam. Dengan latar belakang tersebut sangat menarik untuk dikaji bagaimana peran NU dalam memberikan pengaruh terhadap dasar negara Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikan segala sesuatunya dengan cermat dan terarah, dan dengan menggunakan pendekatan sosial politis. Sedangkan teknik pengelolaan data yang digunakan adalah *library* dan metode analisa menggunakan Analisa deduktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian dari fakta tersebut akan ditarik kesimpulan secara khusus.

NU memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan Ideologi negara Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan sampai dengan masa Konstituante NU vokal untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Akan tetapi setelah melalui perjuangan dan usaha maksimal NU harus rela untuk menerima kenyataan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan paksaan dan berimbas adanya perpecahan. Setidaknya kewajiban untuk menegakkan Syariat Islam sudah dilaksanakan masalah hasilnya itu perkara lain. Yang terpenting tujuan Islam yaitu *rahmatan lil 'alamin* (kesejahteraan bagi semesta) dapat terealisasi, dengan maksud yaitu penyatuan visi Islam tentang kehidupan ke dalam tujuan utama pendirian negara-bangsa. Hal ini berangkat dari kaidah *al-ghayah wa al-wasail* (tujuan dan metode), NU menempatkan negara sebagai alat bagi pencapaian tujuan Islam. Maka, karena tujuan Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* (kesejahteraan bagi semesta), negara yang mengarah ke tujuan tersebut bisa diterima, meskipun tidak berbentuk Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Mahmudi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Mahmudi : 07370005
Judul Skripsi : **Peran NU Dalam Pembentukan Ideologi Negara RI**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Januari 2014

Pembimbing

Dr. Subandi, S.Ag, M.Si.

NIP. 19750517 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2039/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : PERAN NAHDHATUL ULAMA DALAM
PEMBENTUKAN IDEOLOGI NEGARA RI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Mahmudi

NIM : 07370005

Telah di Munaqasyahkan pada : 8 April 2014

Nilai Munaqasyah : A/B (85)

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 197505172005011004

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 196501311992031004

Penguji III

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197311051996031002

Yogyakarta, 08 April 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 197112071995031002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Mahmudi
NIM : 07370005
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Januari 2014

Yang Menyatakan



Ahmad Mahmudi

NIM. 07370005

MOTTO

ليس الفتى من قال كان أبي

إن الفتى من قال ها أنا ذا

ترجوا النجاة ولم تسلك مسالكها

ان السفينة لاتجري على اليبس

PERSEMBAHAN

Atas Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala

Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan

Kepada :

Almamaterku tercinta,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan Jinayah Siyasah

Kepada kedua orangtuaku tercinta

Ayahanda tercinta (Alm) Saman

Ibunda tercinta Jumanah

Terima Kasih

Atas dukungannya, pengorbanannya dan doanya yang tulus

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و

سلم على سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد...

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat-Nya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan tabi'in serta tabi'it tabi'in. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi.
5. Subaidi.S.Ag., M.Si. selaku pembimbing yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.

7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, terima kasih atas segalanya.
8. Romo KH Suja'I Masduqi beserta keluarga yang telah memberikan bimbingan, ilmu, nasehat serta doanya.
9. Ayah, Ibu beserta keluarga di rumah yang telah memberikan segalanya.
10. Rekan-rekan santri PP. Assalafiyah Mlangi yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
11. Rekan-rekan angkatan 2007 jurusan Jinayah Siyasah: Firman, Bagus, Nahda, Alfiyan.... dan semuanya. *Khususon Firman nuwun yo...*
12. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi kesehatan selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. *AminYa Rabbal 'alamin*.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 04 Januari 2014

Penyusun



Ahmad Mahmudi
NIM. 07370005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	ditulis	‘iddah

عَدَّة		
--------	--	--

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek

— َ —	<i>fatḥah</i>	Ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
— ِ —	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذکر		ditulis	<i>ḡukira</i>
— ُ —	<i>ḡammah</i>	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	Ditulis	A
---------------	---------	---

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fatḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITRASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERAN POLITIK NU DAN KERANGKA KONSEP DALAM PEMBENTUKAN IDEOLOGI NEGARA	
A. Definisi Peran.....	21
B. Peran Politik Sebagai Teori dan Kerangka Konsep	22
C. Peran NU	26

BAB III PERAN NAHDHATUL ULAMA DALAM PEMBENTUKAN IDEOLOGI NEGARA

A. Masa Orde Lama	28
a) Masa awal Kemerdekaan	28
b) Masa Kontituante	44
c) Masa Pasca Kostituante	67
B. Masa Orde Baru	80

BAB IV PERAN NAHDHATUL ULAMA DALAM PEMBENTUKAN IDEOLOGI NEGARA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM 95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemah.....	I
Curriculum Vitae	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak Indonesia merupakan faktor utama yang mendorong Jepang terlibat dalam Perang Pasifik pada akhir tahun 1941. Selain itu alasan utama Jepang ingin menguasai Indonesia dikarenakan alasan ideologi, yaitu membangun dunia yang damai di bawah ideologi Hakkō Ichū.¹ Siasat tersebut sebelumnya, telah banyak dilakukan Jepang dengan cara memperbanyak melakukan aktivitas internasional supaya menarik simpati bangsa-bangsa yang beragama Islam dan meniupkan slogan anti Barat, seperti menyelenggarakan pertemuan organisasi-organisasi Islam di Tokyo. Jepang juga memiliki sikap yang berbeda dengan Belanda dalam hal menyikapi agama (Islam). Belanda menerapkan politik netral terhadap agama, sedangkan Jepang berusaha mendekati dan membujuk para pemimpin Islam dengan cara mengakomodasi kepentingan mereka, seperti mendukung MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin Indonesia), mendirikan Kantor Departemen Agama, dan mengadakan pelatihan kepada ulama dan kiai.

Namun demikian, politik Jepang ini sangat sedikit mempertimbangkan Islam dalam tingkat sosio-religius. Artinya, Islam dalam hal perkembangan keagamaannya kurang mendapat dukungan dari Jepang. Misalnya dalam hal

¹ Terdapat beberapa penafsiran terhadap makna Hakkō Ichi-u. Namun pada intinya Hakkō Ichi-u bermakna Jepang mendominasi seluruh dunia.

pendidikan, Jepang kurang mendukung perkembangan pesantren.² Sebagaimana penjajah-penjajah lainnya, pertimbangan utama Jepang tetaplah politik. Pendekatan Jepang terhadap Islam hanyalah untuk kepentingan politik semata. Oleh karena kepentingan yang terbesar adalah politik, maka Jepang tidak segan-segan mengizinkan ulama untuk membentuk laskar seperti Hizbullah dan Sabilillah. Izin Jepang ini mempunyai tujuan agar Hizbullah dan Sabilillah dapat mendukungnya dalam perang melawan Sekutu. Namun kebijakan tersebut membawa pengaruh yang positif bagi perkembangan politik umat Islam. Pengaruh positif tersebut bagi umat Islam muncul rasa percaya diri dikarenakan peranan umat Islam dalam pemerintahan Jepang sangat berarti. Selain itu, dibentuknya laskar Hizbullah dan Sabilillah, bagi umat Islam sangat berarti dikarenakan perjuangan umat Islam selama ini yang hanya berlatih menggunakan senjata adat dengan dibentuknya laskar Hizbullah dan Sabilillah maka para pejuang Muslim dapat merasakan menggunakan senjata-senjata modern, sesuatu yang sama sekali tidak mungkin dialami pada masa penjajahan Belanda.³ Sehingga pada masa Revolusi, laskar-laskar tersebut berperan aktif dalam perlawanan terhadap Belanda.

Pendudukan Jepang terhadap Indonesia tidak hanya berdampak terhadap perkembangan umat Islam tetapi juga terhadap kekuatan militer Indonesia, hal ini bisa terlihat pada bulan Maret 1943, Jepang membentuk PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat). Badan ini berada di bawah pengawasan ketat pihak Jepang, tetapi empat

² George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Sebelas Maret University Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995) hlm. 140.

³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm. 99.

orang Indonesia yang terkemuka diangkat sebagai ketuanya, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, ketua Muhammadiyah dari masa sebelum Jepang.⁴ Dengan masuknya Kiai Haji Mas Mansur dalam PUTERA, maka salah satu pemimpin Islam berhasil menduduki kepemimpinan organisasi nasionalis.

Selain itu, Jepang juga mendorong dan memberi prioritas kepada kalangan Islam untuk mendirikan organisasi sendiri. Untuk pertama kali dalam sejarah modern, pemerintah di Indonesia secara resmi memberi tempat yang penting kepada kalangan Islam. Pemerintah Jepang secara berangsur-angsur mengakui organisasi-organisasi Islam, tetapi tidak membolehkan pendirian kembali organisasi-organisasi nasionalis sebelum perang, misalnya seperti Partai Nasional Indonesia (PNI).⁵ Pada tanggal 10 September 1943 Muhammadiyah dan NU disahkan kembali, disusul dengan Perikatan Umat Islam (sebelumnya bernama Persyarikatan Ulama) di Majalengka pada tanggal 1 Februari 1944 dan Persatuan Umat Islam di Sukabumi.⁶

Menurut Deliar Noer⁷ ada beberapa faktor yang mendorong Jepang mensahkan kembali ormas-ormas Islam. Pertama, Jepang mengalami kemunduran kedudukan dalam Perang Pasifik. Hal itu menyebabkan Jepang memerlukan bantuan yang lebih besar dari rakyat, khususnya penduduk di daerah pedesaan. Oleh karena itu diperlukan suatu organisasi yang dipatuhi oleh penduduk. Kedua,

⁴ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2008) hlm. 415.

⁵ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987) hlm. 23.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 23-24.

Kenyataan bahwa organisasi-organisasi tersebut, walau tidak resmi, masih melanjutkan kegiatan mereka dengan pimpinan dan guru-guru setempat, bahkan masih sering menjaga koordinasi di antara sesama mereka. Hubungan tidak resmi tersebut mempersulit Jepang dalam melakukan pengawasan. Lewat pengesahan, maka pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Ketiga, pengakuan Jepang terhadap fungsi PUTERA dan kemudian Himpunan Kebaktian Rakyat (Jawa Hokokai) yang tidak mampu memperoleh dukungan penuh dari kalangan Islam. Keempat, Jepang tampaknya ingin memperbaiki beberapa kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap kalangan Islam, seperti mewajibkan pelaksanaan upacara sai keirei (memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan 90° ke arah Tokyo), menahan K.H. Hasyim Asya'ari selama empat bulan, dan menutup beberapa madrasah dan pesantren selama beberapa bulan pada awal pendudukan.

Pada awal pendudukannya, Jepang membentuk Shumubu (Kantor Departemen Agama) di ibukota dan pada tahun 1944 dibuka cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dengan nama Shumuka. Pada awalnya, badan ini diketuai oleh seorang Jepang bernama Horie (1942), kemudian digantikan oleh Prof. Husein Djajaningrat, dan kemudian K.H. Hasyim Asy'ari (1944). Pemerintah Jepang juga mengadakan pelatihan penghulu, urusan-urusan kenegaraan, dan lain sebagainya.⁸

Menurut Benda, terdapat tiga perbedaan kebijakan Belanda dengan Jepang terhadap Islam pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya,

⁸Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1994), hlm. 25.

yaitu:⁹ Pertama, pada masa penjajahan Belanda, yang menjadi sandaran politik kolonial adalah kaum priyayi, sedangkan pada masa pendudukan Jepang adalah golongan Islam¹⁰ dan nasionalis sekuler.¹¹ Kedua, pada masa penjajahan Belanda, pemimpin nasionalis sekuler mengalami penindasan, seperti misalnya dibuang, sedangkan pada masa Jepang pemimpin nasionalis sekuler diakui secara resmi dan diangkat menjadi pejabat dalam pemerintahan militer Jepang. Dan ketiga, pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memberi angin kepada golongan Islam, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang justru sebaliknya. Pemerintah Jepang meningkatkan posisi Islam baik dalam bidang sosial-religius maupun dalam bidang politik. Kenyataan ini sangat mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia kelak. Dukungan Jepang yang memberikan porsi lebih besar kepada golongan Islam dibandingkan dengan Belanda menyebabkan golongan Islam dapat berperan lebih besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Hal inilah yang nampaknya menyebabkan golongan Islam merasa memiliki saham yang besar, selain tentunya konsistensi kalangan Islam dalam menentang penjajahan Belanda, terhadap perjuangan kemerdekaan di Indonesia sehingga umat Islam merasa memiliki hak yang besar agar keinginan mereka, seperti pengakuan Islam sebagai ideologi negara pada masa kemerdekaan, diakui pemerintah.

⁹ Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation*, (W. vanHoeve Ltd. – The Hague and Bandung, 1958). hlm. 199-201

¹⁰ Golongan Islam adalah kelompok yang berusaha menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia.

¹¹ Golongan sekuler adalah kelompok yang menolak Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.

Pada bulan Oktober 1943, pemerintah Jepang membubarkan MIAI karena dinilai anti Jepang. Kemudian Jepang membentuk organisasi federatif baru yang bernama Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin Indonesia) dengan pendukung utama berasal dari Muhammadiyah dan NU.

Menurut Benda, terbentuknya Masjumi merupakan kemenangan politik Jepang terhadap Islam.¹² Memang tidak dapat dibantah, Masjumi dibentuk untuk mendukung pemerintah pendudukan Jepang. Namun, beberapa pemimpinnya berusaha melencengkan tujuan tersebut, seperti diakui oleh K.H. Wahid Hasyim.¹³ Dukungan yang besar terhadap golongan Islam menyebabkan golongan nasionalis sekuler mengalami kemerosotan sehingga tidak mampu menyaingi Masjumi. Namun demikian, perkembangan berikutnya berbalik arah. Menjelang proklamasi, terutama setelah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 29 April 1945, Jepang memberikan dukungan porsi yang lebih besar kepada golongan nasionalis sekuler daripada golongan Islam. Jepang tampaknya lebih mempersiapkan golongan nasionalis sekuler untuk memegang kendali politik Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam “persaingan” kepemimpinan nasional, golongan Islam gagal menandingi popularitas golongan nasionalis sekuler, terutama Soekarno dan Mohammad Hatta.¹⁴

Barangkali NU tidak pernah mengimpikan jam’iyyahnya akan menjelma menjadi partai politik. Sebab NU lahir bukan dari wawasan politik, bukan karena

¹²Benda, *The Crescent*, hlm. 151.

¹³Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986) hlm. 81.

¹⁴Thaba, *Islam dan Negara.....*, hlm. 151

kepentingan kursi di parlemen ataupun posisi penting di pemerintahan. Namun sejarah telah mencatat, selama sembilan belas tahun (1952-1971) organisasi ini telah melibatkan diri dalam kancah politik.

Semenjak Masyumi lahir sebagai partai politik Islam (November 1945) NU bersama Muhammadiyah dan organisasi kebangsaan lain menjadi anggota istimewa dengan mengirimkan wakil-wakilnya di panggung politik melalui Masyumi. Hal ini mudah dimengerti karena NU ikut andil besar dalam merintis Masyumi di zaman Jepang. Oleh sebab itu, posisi penting di Majelis Syuro berada di tangan NU. Tetapi perkembangan politik tidak selamanya sesuai dengan perhitungan di atas kertas. Setidaknya para politisi NU mengakui akan kebenaran pernyataan ini. Betapapun pentingnya posisi NU di dalam Majelis Syuro, ternyata pada perkembangan berikutnya tidak lebih hanya merupakan kumpulan nasehat yang tidak diperlukan lagi. Yang pada akhirnya menjadikan NU melepaskan diri dari Masyumi. Setidaknya perkembangan situasi di masa revolusi fisik dapat menyikap tabir rahasia perpisahan tersebut.

Peristiwa dapat terlihat ketika pemerintahan Syahrir (14 November 1945 – 3 Juli 1947) menciptakan Perjanjian Linggarjati dan pemerintahan Amir Syarifudin (3 Juli 1947 – 29 Januari 1948) menciptakan perjanjian Renville maka perjanjian itu ditentang keras NU lewat Masyumi. Dan sejak saat itu suara Masyumi mulai pecah menjadi dua. NU menentang Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville karena telah melihat pihak Belanda tidak lebih hanya ingin mengingkari janji. Sehingga tidak perlu perjanjian-perjanjian diciptakan jika hasilnya mesti merugikan pihak Republik.

Selanjutnya dalam hal peraturan intern Masyumi menerapkan aturan yang tidak demokratis. Misalnya, menerapkan adanya anggota perorangan yang peranannya justru mengalahkan anggota istimewa (wakil perkumpulan atau organisasi). Anggota perorangan tersebut membentuk semacam aliansi untuk mendesak NU dari arena politik. Keinginan itu terwujud dalam Mukhtamar Masyumi IV (15-19 Desember 1949) di Yogyakarta yang berhasil mengubah AD-ART pasal Majelis Syuro. Dewan Tertinggi yang sejak semula dipegang NU itu, oleh Mukhtamar diubah statusnya hanya sebagai penasehat. Berarti tamatlah peranan Majelis Syura yang menjadi kebanggaan NU. Apalagi ada sindiran dari kelompok intelektual berpendidikan barat yang mengatakan bahwa NU tidak layak bergerak di lapangan politik. Hal ini dinilai karena ulama tidak pada tempatnya mengurus politik karena lebih pantas memegang jabatan di langgar, masjid, mushola atau pesantren.

Tingkah laku politik Masyumi semakin menjengkelkan. Hal tersebut tercermin dalam politik pemulihan keamanan dalam negeri yang dilakukan kabinet Nasir (6 september 1950 – 27 April 1951) di Jawa Barat (pemberontakan DI / TII) dan politik pemulihan keamanan kabinet Sukirman (27 April 1951 – 3 April 1952) di Jawa Tengah (peristiwa Batalyon 426) dipandang NU berbau tipu daya dan cukup merugikan prestise umat Islam.

Dalam Parlemen jumlah kursi kementerian yang diberikan kepada NU sangat tidak sebanding dengan kebesarannya. Demikian pula pada kepemimpinan eksekutif partai tokoh-tokoh NU seolah tergencet ke pinggiran arena percaturan politik. Memang NU lebih banyak duduk di kursi Menteri Agama karena itu

memang satu-satunya pemberian. Di bagian kementrian lain, tiga, empat bahkan lima kursi selalu didominasi kelompok intelektual Masyumi. Karena itu tidaklah tepat apabila tuntutan NU terhadap kursi Menteri Agama dianggap sebagai penyebab utama perpisahan NU-Masyumi. Mungkin lebih tepatnya hal tersebut sebagai pemicu dalam mempercepat proses perpisahan tersebut. Dan benar, proses itu berjalan begitu cepat. Hanya dalam waktu dua bulan (Maret-April 1952) NU menarik diri dari Masyumi melalui Mukhtamar ke-19 (28 April – 1 Mei 1952) di Palembang. Dengan demikian NU sudah membuka lembaran sejarah baru. Jika semula hanya menitik beratkan orientasinya terhadap masalah sosial dan keagamaan saja, maka sejak mukhtamar Palembang NU menambah orientasi kepada masalah politik, AD-ART pun sudah tidak bernam jam'iyah tetapi sudah diubah menjadi AD-ART partai politik NU. Namun pola organisasi NU masih tetap pola organisasi jam'iyah diniyah yakni menempatkan ulama pada posisi sentral.

Pada tanggal 8-13 September 1954 partai NU mengadakan Mukhtamar ke-20 di Surabaya. Mukhtamar ini merupakan Mukatamar pertama sejak NU menjadi partai politik. Secara tidak langsung Mukhtamar ini juga merupakan kerja konsolidasi untuk menghadapi pemilu. Tentu saja perhatian diarahkan ke persoalan politik sebab pemilu yang akan berlangsung pada 29 September 1955 untuk anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante merupakan momentum penting bagi mengukur potensi NU dan menentukan nasib dasar negara.

Sejak awal, pemikiran politik Indonesia modern dalam merespon wacana dasar negara juga ditandai dengan munculnya bermacam corak pemikiran para intelektual yang diaktualisasikan dengan pembentukan organisasi atau partai. Setidaknya ada empat corak pemikiran yang direpresentasikan oleh masing-masing pendukungnya, yaitu; pertama, tradisionalisme Jawa seperti Budi Utomo (berdiri 20 Mei 1908) dan Taman Siswa. Kedua, nasionalisme sekuler seperti Nationale Indische Partij (1913), Partai Nasional Indonesia (4 Juli 1927), Partindo (April 1931), Parindra (26 Desember 1935), dan Gerindo (24 Mei 1937). Ketiga, sosialisme-komunisme seperti ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) yang kemudian berubah nama menjadi PKI (23 Mei 1920). Keempat, Islam seperti SDI (1911) yang berubah menjadi SI (1912), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul 'Ulama' (1926), Perti (1930), dan Partai Islam Indonesia (1938). Kemudian pada masa pasca kemerdekaan, seperti tercermin dalam Konstituante (1956-1959), empat corak pemikiran tersebut tersaring menjadi tiga ideologi besar, yaitu pertama, ideologi Pancasila yang diperjuangkan oleh partai-partai seperti PNI (Partai Nasional Indonesia) dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Kedua, ideologi Islam yang diperjuangkan oleh partai-partai Islam seperti partai Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) dan partai NU Nahdlatul Ulama) dan ketiga, ideologi Sosial-ekonomi sebagaimana diperjuangkan oleh partai Murba dan partai Buruh.

Tiga ideologi besar ini juga masih mewarnai pertarungan politik aliran pada era Reformasi. Tetapi, karena ideologi yang ketiga ini tidak begitu populer di telinga para simpatisan politik, maka dalam pertarungan wacana seakan-akan

telah mempolarisasi menjadi pertarungan antara ideologi Islam dan ideologi Pancasila secara berkepanjangan, yang pada gilirannya menghadirkan sebuah penghadapan antara Islam versus negara.¹⁵

Perdebatan tentang dasar Negara membawa Majelis Konstituante ke jalan buntu. Perdebatan yang terjadi bersifat ideologis dan antagonistik sehingga partai-partai, terutama dari kubu Islam pendukung ideologi Islam dan kubu nasionalis pendukung ideologi Pancasila, saling menjauh dan tidak dapat dikompromikan.

Pendukung ideologi Pancasila menuduh bahwa ideologi Islam anti pluralisme mengingat Negara Indonesia adalah Negara Heterogen secara keagamaan. Pendukung ideologi Islam mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi Negara dengan argumentasi bahwa Islam bersifat Universal, Islam lebih unggul daripada ideologi-ideologi lainnya, dan sebuah realitas bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Mereka memandang bahwa Pancasila pada dasarnya adalah ideologi sekuler (*lâ dîniyyah*) tanpa pijakan agama yang pasti. Pemahaman politik seperti ini telah menunjukkan corak teologis tersendiri dari romantisme sejarah Muslim Indonesia yang cukup berpengaruh dalam pencarian bentuk karakter kebangsaan atau *nation character buildings* bangsa Indonesia hingga dewasa ini.¹⁶

¹⁵ Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 18-19.

¹⁶ *Ibid.*, hal 6-7.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran, atas dasar latar belakang tersebut, yang menjadi masalah sebagai berikut: Bagaimana peran Nahdatul Ulama dalam pembentukan Ideologi Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tentang peranan NU dalam pembentukan ideologi Negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan terlebih untuk bahasan kajian Fiqh Siyasah.
- b. Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khasanah keilmuan politik untuk khalayak umum dan khususnya di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalajaga.

D. Telaah Pustaka

Pengembangan dari penelitian sebelumnya, yang mencoba meneliti pada objek penelitian Nahdatul Ulama, dimana peneliti sebelumnya mencoba mengangkat tentang historis Nahdatul Ulama dalam Masyarakat dari data yang kami peroleh. Rupa-rupanya masih menarik untuk di kaji kembali dari sudut pandang yang berbeda, sesuai dengan latar belakang yang sudah kami jelaskan didepan. Kami mencoba mengambil dari permasalahan bahwa Nahdatul Ulama

mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter bangsa pada masa konstituante. Ada beberapa literatur yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini antara lain: Andree Feillard dalam buku yang berjudul *Vis-a-vis Negara*. Dalam buku itu membongkar sejumlah stereotype Islam tradisional dengan menunjukkan komitmen yang mendalam kelompok Islam Tradisionalis terhadap nilai-nilai kebangsaan keterbukaan mereka terhadap pembaharuan sosial dan pendidikan serta mendalamnya dialog dengan kebudayaan lokal. Dalam buku ini menggunakan pendekatan Sosial historis yang berkembang di Nahdhatul Ulama.¹⁷

Masih dalam kerangka yang sama, Dr. Ahmad Yani Ashori menulis “Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia”. Menggambarkan perdebatan antara partai Islam dengan kaum Nasionalis dalam pembentukan Ideologi negara pada awal kemerdekaan.¹⁸

Dalam buku Choirul Anam yaitu tentang “Pertumbuhan dan perkembangan Nahdatul Ulama” di dalam buku ini menceritakan tentang perkembangan Nahdatul Ulama’ dalam kehidupan masyarakat dan ketika berubah menjadi partai serta kembali kepada organisasi kemasyarakatan.¹⁹

Berdasarkan dari karya tulis yang ada, maka penulis dalam hal ini ingin menambahkan kajian politik tentang peranan Nahdatul Ulama’ dalam membentuk Ideologi Negara pada majlis konstituante.

¹⁷ Andree Feillard....., *Nu Vis-a-vis*

¹⁸ Yani Anshori....., *Tafsir Negara Islam*

¹⁹ Anam....., *Pertumbuhan dan perkembangan*

E. Kerangka Teoritik

Sebagai instrument untuk menganalisa peran NU dalam pembentukan ideologi Negara maka penulis menggunakan teori kenegaraan teoritikus muslim, Imam Al Ghozali. Teori al Ghazali dalam hal kenegaraan didasarkan atas konsep *al maslahat*. Hal ini senada dengan perjalanan politik NU yang selalu mengedepankan maslahat dalam memutuskan suatu hukum. Meskipun konsep maslahat sebagai sarana pemecahan hukum di tengah-tengah masyarakat bukan merupakan barang jadi yang sudah disepakati secara utuh namun pada hakikatnya hampir semua ahli hukum Islam menerima konsep ini, yang hanya ada terjadi perbedaan istilah belaka.²⁰

Memang al Ghazali secara khusus mempunyai tulisan tentang konsep kenegaraan yang berjudul *at-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk* atau tulisan lain yang tersebar di dalam kitab-kitab karangannya namun belum secara tegas menyebutkan bahwa latar belakang konseptual itu adalah al-maslahat. Penulis berusaha mengungkap ulang hasil penelitian Drs. Jeje Abdul Rozak, MA dalam bukunya “Politik Kenegaraan, Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah” bahwa kerangka konsep teori kenegaraan al-Ghazali adalah maslahat. Kemudian penulis menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai pisau analisa dalam menganalisis peran NU dalam membentuk Ideologi Negara RI.

Kata al-maslahat bermakna kepentingan (kemanfaatan) hidup manusia. Konsep dasar hukum yang mengacu pada kepentingan hidup manusia yang tidak

²⁰ Jeje Abdul Rozak, *Politik Kenegaraan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999) hal. 7

secara tegas ditentukan oleh nas baik yang menguatkan atau membatalkannya disebut *maslahat* atau *istislah*. Yang menurut para ulama Ushul adalah *maslahat* yang tidak ada ketetapanannya dalam nas yang membenarkan atau membatalkannya.²¹ Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nas secara tegas dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.²²

Kata *al-maslahat* dengan bentuk jamak *al-mashalih* dari segi bahasa diartikan sebagai

ما يبيح على الصلاح أو ما يتعطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه أو نفع قومه²³

Kata itu sebanding dengan *al-manfa'ah* berbentuk masdar yang berarti *al-shalah*, sebagaimana *al-manfa'ah* yang bermakna *al-naf'u*. Dengan demikian segala sesuatu yang mengandung kegunaan (*naḥ'u*) wajar disebut *al-maslahat*. Dengan kata lain, *al-maslahat* adalah sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan kepada manusia.

Sedangkan menurut al Ghazali *maslahat* lebih tepat diartikan

المحافظة على مقصود الشرع من الخلق²⁴

²¹ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1977) hal. 84

²² Ibid

²³

Al maslahat seperti yang dimaksudkan al ghazali ini ternyata berkonotasi al mursalat karena terlepas dari dalil-dalil yang menunjukkan adanya i'tibar dan ilgha'i. Dalam definisi yang lain al maslahat adalah

المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم من حفظ دينهم و نفوسهم و عقولهم و نسلهم و اموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها.²⁵

“kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syar’I (Allah SWT) untuk umat manusia dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan tertib yang telah ditentukan tersebut.

Dalam kaitan ini ulama’ ushul fiqh membagi maslahat menjadi tiga kategori:²⁶

- a. *Al-masholih al-mu’tabaroh* yaitu kemaslahatan yang dinyatakan secara tegas oleh dalil syara’ agar dipelihara dengan baik
- b. *Al-maslahah al-mulghah* yaitu suatu kemaslahatan yang secara hukum syara’ tidak termasuk dalam kategori maslahat.
- c. *Al-maslahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang oleh hukum tidak dinyatakan kebenarannya dan juga tidak ditegaskan ketidakbenarannya.

Maslahat mursalat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

²⁴ Al buthi

²⁵

²⁶ Musthafa sa’id al-khun, *Asar al-ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi khtilaf al-Fuqaha’*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981) hal. 552-554.

1. Maslahat itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan madharat.
2. Maslahat itu bersifat umum, bukan kepentingan perorangan tapi bermanfaat untuk kepentingan orang banyak
3. Maslahat itu tidak bertentangan dengan nas dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.²⁷

Seperti halnya metode ijtihad yang lain, tidak ada kesepakatan ulama mengenai kehujahan *maslahat mursalat* sebagai salah satu metode penggalian hukum. Setidaknya terdapat tiga pendapat yang berkembang di kalangan ulama' ushul. Pendapat yang mengakui *maslahat mursalat* sebagai hukum dipelopori oleh Imam Malik dan disepakati oleh Imam Ahmad. Pendapat yang menolak *maslahat mursalat* sebagai dasar hujah dipelopori oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Sedangkan pendapat terakhir adalah berasal dari tokoh Hanabilah yang bernama Imam Thufi yang memakai pemakaian istilah secara ekstrim.

Bagi Imam Ghazali yang termasuk kategori maslahat mursalat adalah maslahat yang jenisnya mendapat legitimasi dari syara'. Ia memasukkannya dalam bab *qiyas* bahkan satu-satunya dalam bab *qiyas*. Karena maslahat yang

²⁷ *Ibid.*, hal 86-87

jenisnya mendapat legitimasi dari syara' tidak masuk dalam bab *qiyas* tetapi itu termasuk *maslahat mursalat*.²⁸

Menurut Al Ghazali hubungan antara agama dan politik merupakan saudara kembar, artinya sangat dekat dan saling bergantung. Agama adalah dasar dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan suatu dasar tanpa penjaga akan hilang.²⁹ Dengan pengertian yang lain dapat dipahami bahwa Negara merupakan alat untuk melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan akhirat.

F. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah,³⁰ dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah yaitu untuk menjawab persoalan yang menyusun teliti. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga dengan metode ini akan dikaji dari berbagai sumber

²⁸ Husain Hamid Hasan, *Nazariyat al-maslahat fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar an Nahdah al-‘Arabiyah, 1971) hal. 8

²⁹ Al Ghazali, *Ihya’ Ulum ad-Din* (Beirut: Dar al Fikr, 1995) Juz I. Hal. 31

³⁰ Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993)

kepuustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik berupa buku, majalah, artikel maupun opini.³¹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskritif analisis* yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode *deskritif analisis* ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Adapun analisis disini adalah: analisis dalam pengertian normatif, yaitu meneliti kejelasan bagaimana pandangan siyasah Islamiyah tentang peranan NU dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan sosial politis, untuk mampu memahami dan mengerti kondisi sebenarnya bagaimana peranan NU dalam membangun karakter bangsa.

4. Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan data bersumber dari buku – buku penting yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Dilakukan dengan metode *library research*, yaitu: penelitian literatur, menganalisis data-data tentang peranan NU dalam membangun karakter bangsa Indonesia pada masa konstituante.

5. Analisa data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan pendekatan :

³¹ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hlm.11.

Analisa deduktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian dari fakta tersebut akan ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terdiri atas beberapa sub bab yakni : *pertama*, diawali dengan pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, menjelaskan tentang peran politik sebagai teori dan kerangka konsep dalam pembentukan ideologi negara.

Bab *tiga*, di dalam bab ini memuat tentang peran NU mulai dari masa kemerdekaan sampai masa paska Konstituante.

Bab *empat*, memuat analisis tentang peran NU dilihat dari sudut pandang teori peran.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini dituangkan dalam *bab lima* yang sekaligus merupakan bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Awal Kemerdekaan Indonesia, peran NU sebagai pergerakan dan organisasi keagamaan adalah salah satu organisasi yang sangat getol menyuarakan Islam sebagai Ideologi Negara, Hal ini terlihat dalam perdebatan yang sengit di dalam panitia sembilan antara golongan nasionalis dan Islamis. Perdebatan yang sengit tersebut adalah mencantumkan kata-kata syariat Islam atau tidak. Namun perdebatan tersebut bisa diakhiri ketika Moh. Hatta menerima kunjungan seorang perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang menyampaikan keberatan-keberatan penduduk dari Indonesia Timur, yang tidak beragama Islam, mengenai dimuatnya Piagam Jakarta pada Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Apabila tidak diubah, mereka, lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Maka setelah itu Moh. Hatta memanggil empat anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan yang dianggap mewakili Islam yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku Mohammad Hasan dan Wahid Hasyim dengan menjelaskan tentang keluhan masyarakat Indonesia bagian Timur yang tidak beragama Islam tentang dimuatnya Piagam Jakarta dalam Muqodimah Undang-undang. Untuk itu NU sebagai sebuah gerakan sosial politik dengan pemikiran yang matang tentang kesatuan Indonesia akhirnya mengesampingkan hal tersebut dengan prinsip untuk menegakkan semangat Keindonesiaan tanpa

menghilangkan nilai-nilai keislaman. Maka sebagai gantinya Wahid Hasyim mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, penambahan kata Esa menggarisbawahi keesaan Tuhan (tauhid) yang tidak terdapat pada agama lain. Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi negara Islam, namun menjadi negara monoteis. Presiden harus diangkat dari orang Indonesia asli, tanpa ketentuan jelas mengenai agamanya. Presiden, juga Wakil Presiden, bebas memilih upacara pengambilan sumpah jabatan, secara keagamaan atau janji

Perjuangan NU membangun bangsa adalah menempatkan negara sebagai alat bagi pencapaian tujuan Islam. Maka, karena tujuan Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* (kesejahteraan bagi semesta), maka langkah negara yang mengarah ke tujuan tersebut bisa diterima, meskipun tidak berbentuk Islam dengan kata lain penyatuan visi Islam tentang kehidupan ke dalam tujuan utama pendirian negara-bangsa. Hal ini berangkat dari kaidah *al-ghayah wa al-wasail* (tujuan dan metode), yang NU menempatkan negara sebagai alat bagi pencapaian tujuan Islam. Maka, karena tujuan Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* (kesejahteraan bagi semesta), negara yang mengarah ke tujuan tersebut bisa diterima, meskipun tidak berbentuk Islam. Oleh karena itu, NKRI, yang memuat “keadilan sosial” sebagai tujuan konstitusional bernegara, diterima oleh NU, meskipun ia bukan negara Islam yang formal. Maka dengan hal inilah NU lebih memfokuskan bagaimana cara mempersatukan masyarakat Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Indonesia, dan tidak melupakan nilai-nilai keislaman yang selama ini di tanamkan.

B. Saran

1. Sebagai sebuah Organisasi Islam dan juga menjadi salah satu pelopor kemerdekaan Indonesia, setidaknya sikap moderat NU tersebut ditunjukkan lebih awal sebelum adanya kritikan ataupun masukan dari tokoh-tokoh masyarakat.
2. Semangat kemerdekaan para Ulama yang begitu berlebihan untuk menerapkan Ideologi Islam khususnya NU hendaklah dihindarkan, karena akan menimbulkan gesekan di masyarakat, sehingga cita-cita kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan akan menjadi sia-sia.
3. Sebagai pelopor kemerdekaan, NU hendaklah tetap menjaga konsistensi dalam menjaga ideologi Islam, yang diterapkan dalam memengawasi dan memberi masukan terhadap pemerintah, sehingga wujud cita-cita menjadi negara demokratis akan terwujud.
4. Pada prinsipnya perjuangan NU dalam politik hendaknya dapat diwakilkan saja oleh para kadernya melalui Masyumi sehingga proyeksi NU sebagai organisasi masyarakat akan lebih bermanfaat ketimbang menjadi partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

A) Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syamiil, 2006.

B) Referensi Buku /lain-lain

Ali, Fachry & Effendy, Bahtiar *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* Bandung, Mizan, 1986.

Al Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, Beirut: Dar al Fikr, 1995.

Al-khun, Musthafa sa'id, *Asar al-ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi khtilaf al-Fuqaha'*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1981.

Anshori, Ahmad, Yani, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Anshari, Endang, Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung Pustaka, 1981.

Benda, Harry J. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation*, W. vanHoeve Ltd. – The Hague and Bandung, 1958.

BNO, 15 Agustus 1940, tahun ke 9 edisi 227.

Boland. *Pergumulan Islam di Indonesia*, Grafiti Press, 1985.

Coulson, Noel J., *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, terjemahan dari 'The History of Islamic Law', Jakarta, P3M, 1987.

Dahm, Bernhard *Sukarno and Struggle for Indonesian Independence*, Ithaca N.Y.: Cornel University Press, 1969.

Djazuli, A., *Fiqih Siyasah*, Cet ke-3, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Dijk, C., van, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, terjemahan dari *Rebellion Under the Banner of Islam*, Jakarta, Grafiti Pers, 1983.

Feillard, Andree *NU vis-a-vis Negara*, Yogyakarta, LKIS, 1999.

- Halim, Abdul, *Sejarah Perjuangan KH. A. Wahab Hasbullah*, Bandung: PT. Baru, tt.
- Hasan, Husain Hammid, *Nazariyat al-maslahat fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar an Nahdah al-‘Arabiyah, 1971.
- Jalal, Syarif, Muhammad & Muhammad, Ali, Abdul Mu‘thi, *al-Fikr al-Siyasyi fi al-Islam*, Jilid III, Iskandariyah, Dar al-Jami‘at al-Mishriyat, 1978.
- Jamil, Muhsin, dkk, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan NU* Cirebon: Fahmina Institute, 2008.
- Jidan, Khalid, Ibrahim terj. Mashrohin, *Teori Politik Islam: Tealaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kahin, George, McTurnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Kholaf , Abdul Wahhab, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut, Dar al-Qalam, 1977.
- Kunto, Suharsini, Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta, Shalahuddin Press, 1994.
- Maarif, Ahmad, Syafii *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta, LP3ES, 1985.
- Mas’oed, Mohtar, *Ekonomi Politik Internasional*, Jakarta, LP3ES, 1999. M.S., Kaelan,. *Pendidikan Pancasila* Yogyakarta, Pradigma, 2004.
- Mansur, Ali, RM., dalam *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante*, jil.II.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1980.
- _____, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta, LP3ES, 1990.
- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Bandung, Mizan, 2000.
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam* cet. ke-1 (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2012).
- Moeloleng, Lexy, J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda Karya, 1993.
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* Jakarta: Grafiti Pers, 1987.

- Purwantari, BI., *Stagnasi Dibalik Oposisi Setengah Hati*, Jakarta, Kompas, 2011.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Serambi, 2008.
- Rozak , Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1999.
- Soekanto, Soerjano, *Sosiologi Suatu Pengantar* , Cet ke-37, Jakarta Garafindo Persada, 2004.
- _____, *Memperkenalkan Sosiologi* Jakarta CV. Rajawali , 1982.
- Wahid, Abdurrahman, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini*, Prisma, nomor 4, April 1984.
- Yahya, Altalib, Hisham, *Training Guide for Islamic Workers*, Herndon, The International Institute of Islamic Thought, 1991.
- Zuhri, Saifuddin *Berangkat dari Pesantren*, Jakarta, Gunung Agung, 1987.
- <http://www.scribd.com/doc/22318053/konsep-diri>,.
- <http://www.damandiri.or.id/file/suwandiunairbab21.pdf>,.
- yuniaracatur.blogspot.com/2012/10/pemikiran-para-tokoh-negara-indonesia.html.

LAMPIRAN

Terjemahan Kutipan Arab, Ayat Al-Qur'an

NO	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB II			
1	23	6	Sesungguhnya Agama Tauhid ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kamu kepadaku
BAB III			
2	56	56	Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.
3	56	57	Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir"
4	60	64	28:76. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri". 28:77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 28:78. Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.
5	62	67	Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Mahmudi
TTL : Gunung Kidul, 22 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Bedilan Margokaton Seyegan Sleman Yogyakarta
Hobby : Membaca
E-mail : cahbedilan@yahoo.co.id

Orang Tua :

- a. Ayah : (Alm) Saman
- b. Ibu : Jumanah

Alamat Orang Tua : Bedilan Margokaton Seyegan Sleman Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1995-2001 : SD Sumbergiri Ponjong Gunungkidul
- 2001-2004 : MTsN Sumbergiri Gunungkidul
- 2004-2007 : MAN Yogyakarta III
- 2007-sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Organisasi :

- Ketua OSIS MTsN Sumbergiri 2002-2004
- Tonti MAN Yogyakarta III 2004-2005

- Sekretaris Pengurus Pon.Pes Assalafiyyah Mlangi Yogyakarta 2009-2010
- Lurah Pon.Pes Assalafiyyah Mlangi 2010-2011
- Ketua Program Paket Kesetaraan PP. Assalafiyyah 2010
- Kor.Bid. Litbang PP. Assalafiyyah 2012
- Kepala Tata Usaha MTs Assalafiyyah 2013 - sekarang

Yogyakarta, 25 November 2013

Penyusun

AHMAD MAHMUDI

NIM 07370005